



Proyek Biogas Selat Macet

Gara-gara Ada Pengaduan ke Polda Bali

SEMARAPURA - Proyek sumber daya energi terbarukan berupa instalasi biogas di Desa Selat, Klungkung dihentikan. Padahal, berdasarkan surat perintah kerja, proyek Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) tertanggal 10 Juli 2015.

Informasi yang dirangkum koran ini, proyek yang dib-

iyai Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015, itu sebesar Rp 1.042.000.000. Dengan dana pendamping dari APBD Kabupaten sebesar Rp 104.241.300. Sehingga total dana untuk proyek itu mencapai Rp 1.146.241.300. Proyek tersebut, dikerjakan CV Pradnya Teknik. Tercatat, ada sebanyak 60 unit biogas di desa setempat. Rinciannya, di Dusun Payungan sebanyak 24 unit, Tangkedan sebanyak 15 unit. Ada juga delapan unit di Gembalan, tiga unit di Dusun Selat, dan 10 unit

di Dusun Apet.

Saat dikonfirmasi, Plt Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Pemkab Klungkung, I Wayan Sumarta, mengakui proyek biogas itu macet. Pasalnya setelah proyek itu berjalan, ada pengaduan ke Polda Bali. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Pedesaan, Made Catur Adnyana, Sumarta menyebutkan, dalam surat pengaduan itu, ada dugaan mark up HPS (Harga

Perkiraan Sendiri) pada proyek tersebut. "Karena ada aduan ke Polda Bali, akhirnya putus kontrak. Itu kesepakatan kami dengan pemenang tender. Lagipula anggarannya juga belum diamprah," jelas Sumarta ditemui di kantornya, Selasa (1/9).

Dengan adanya persoalan itu, Sumarta yang Kepala Badan Kesbangpolinmas Klungkung, ini mengaku akan mengecek ke lapangan, selanjutnya melaporkan ke Bupati Klungkung. "Apakah proyeknya dilanjutkan atau bagaimana, kami laporkan

dulu," tandas dia.

Ditemui terpisah, Perbekel Selat I Wayan Sudiana, mengaku tidak tahu persis proyek tersebut. Ditemui di kantornya, Sudiana juga mengaku tak tahu pasti nilai proyek tersebut. Sebelum proyek itu berjalan, Sudiana mengaku mendapat informasi secara lisan dari salah seorang warga. Awalnya, warga tersebut menawarkan proyek biogas sebanyak 80 unit di Selat. Namun, karena ada beberapa kendala, hanya bisa terpenuhi 60 unit. (wan/gup)



Terdakwa Korupsi Paving Jalan Gajah Mada Diadili

DENPASAR - Kasus dugaan korupsi paving Jalan Gajah Mada Denpasar memasuki sidang perdana dengan dua terdakwa Alit Widhiadnyana AS, sebagai Direktur PT Alit Wirajaya bersama terdakwa Ngurah Kosala Cakrawerthi (terdakwa dalam berkas terpisah), Direktur CV Unika Design sebagai konsultan pengawas kegiatan. Jaksa dalam dakwaannya menuding kedua terdakwa telah merugikan keuangan negara Rp 210 juta.

Disebutkan jaksa, kasus ini berawal dari penetapan Jalan Gajah Mada sebagai kawasan heritage 2012. Lantas, dilakukan penataan salah satunya penataan pedestrian berupa pavingisasi. Proyek itu pun dianggarkan Rp 3,15 miliar dan dimenangkan PT Alit Wirajaya dengan penawaran Rp 2,5 miliar. "Dalam pelaksanaan proyek ini, tidak sesuai dengan perencanaan atau tidak sesuai DED, terjadi perubahan volume," beber jaksa Agus Suraharta dkk.

Atas pekerjaannya ini, PT Alit Wirajaya, negara sudah membayar Rp 2,2 miliar, namun nilai fisik barang yang diterima oleh negara adalah Rp 2 miliar. Sehingga negara dirugikan Rp 210. 541. 795, sesuai hasil audit BPKP. Kedua terdakwa pun dijerat menggunakan UU Tipikor. Kedua terdakwa yang didampingi pengacara Made Wija kepada kepada majelis hakim yang dipimpin Petensili menyatakan tidak mengajukan eksepsi sehingga langsung pemeriksaan saksi pada sidang pekan depan. **(art/yor)**

Edisi : Rabu, 2 September 2015

Hal : 24



Warga Ancam Geruduk Gubernur



SANDUJAYA/RADAR BALI

LAWAN: Puluhan warga mendatangi lokasi proyek normalisasi Tukad Mati, Kuta kemarin.

MANGUPURA - Keputusan Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Bali menghentikan proyek normalisasi dan penguatan dinding Tukad Mati, Kuta, secara mendadak panen kecamatan. Warga di sekitaran Tukad Mati pun kompak menentang keputusan Dishut tersebut. Kecamatan dan penolakan juga meluas hingga ke wilayah Legian dan Seminyak, juga dari Kelompok Nelayan Prapat Agung Mangening Patasari.

Bentuk protes itu ditunjukkan oleh puluhan warga sekitar Tukad Mati yang langsung mendatangi muara Tukad Mati kemarin (1/9). Warga menuntut agar penataan Tukad Mati segera dilanjutkan hingga tuntas. Sebagaimana warga menaiki alat berat eskavator amfibi sambil berorasi. Warga memberikan batasan waktu hingga tiga hari.

"Jika tidak ada solusi, kami den-

gan massa yang lebih besar akan mendatangi kantor Gubernur dan Dinas Kehutanan Bali," cetus Ketua Kelompok Nelayan Prapat Agung Mangening Patasari, I Nyoman Sukra di muara Tukad Mati kemarin.

Dia mengatakan, warga khawatir kalau Tukad Mati tidak dinormalisasi, maka potensi banjir di Kuta, Legian, Seminyak hingga ke Monang-Maning akan kembali terjadi.

"Kenapa sampai begini? Padahal ini kan ranah antar pemerintah. Kami tidak mau lagi banjir," ujar salah seorang panglinsir Patasari, Nengah Sorna.

Tokoh masyarakat Legian I Wayan Puspa Negara juga

bersuara lebih keras. Puspa menyebut Dishut Bali telah bersikap arogan. Sebab, penataan yang dilakukan oleh Pemkab Badung semata-ma-

ta menyelematkan kawasan pariwisata agar terbebas dari ancaman banjir. "Polhut Tahura (Taman Hutan Raya) Ngurah Rai menunjukkan

arogansi sektoral yang tidak memahami hakikat pembangunan kepentingan publik dalam penanggulangan banjir di kawasan destinasi pariwisata

ta Kuta," cetus Puspa kepada koran ini kemarin. (san/yor)

Edisi : Rabu, 2 September 2015

Hal : 24